



**BANTUAN LUAR NEGERI SEBAGAI INSTRUMEN DIPLOMASI:
STUDI KASUS BANTUAN KEMANUSIAAN RUSIA KEPADA DONBAS DALAM
KONFLIK RUSIA-UKRAINA 2014-2015**

Veronika Suci Novitasari Buntaran

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semaang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The Russian-Ukrainian conflict reached its peak in 2014. Conflict exacerbated by the existence of war crimes has caused a humanitarian crisis with various socio-economic impacts and also increased the number of refugees. Since August 2014, Russia has decided to issue humanitarian aid policy in the conflict. This research analyzes the motives of Russia's humanitarian aid policy in Donbas using the theory of neoclassical realism. The results reveal that the policy is a strategy to increase Russian influence in Ukraine. Anarchic international structure with nations competing for power became an independent variable in this research. Putin's view on seeing Russia as a major power and Russia's role in the international world becomes an intervening variable that translates the international situation into the policy. The strategy of humanitarian aid policy with the motive of maintaining influence in Ukraine will also have an impact on the increasing position of Russia in regional countries that can strengthen its status as a global player.

Keywords: *humanitarian aid, Russia, Ukraine conflict, Putin, influence*

PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi di Ukraina pecah pada November 2013, bermula dari protes terhadap Presiden Viktor Yanukovych yang menolak menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa dan malah menerima kontrak baru dengan Rusia sebesar \$ 15 milyar Eurobond Ukraina (bbc.com, 2014). Protes semakin meluas dan menyebabkan turunnya Presiden Yanukovych dari kekuasaan. Protes berpusat di Kiev dan daerah barat Ukraina, yang lebih memiliki kedekatan dengan Eropa dan Barat dibanding dengan Rusia. Protes ini juga menimbulkan protes lain di daerah timur Ukraina, yang lebih dekat dengan Rusia atau pro-Rusia. Penduduk sipil yang berada di timur Ukraina – yang bekerja di industri berat yang memasok pasar Rusia – takut akan kehilangan pekerjaan apabila Ukraina bergabung dengan Uni Eropa, sedangkan penduduk sipil di barat Ukraina menginginkan kemakmuran dan aturan hukum yang mereka percaya akan diberikan oleh Uni Eropa (bbc.com, 2014).

Rusia memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap Yanukovych dan banyak pengamat mengatakan bahwa Rusia telah memainkan pendekatan ‘*stick-and-carrot*’ terhadap Ukraina. Hal itu terbukti dengan ditanggungkannya pinjaman dari Rusia ketika pemerintahan Ukraina mengundurkan diri dan dibatasinya perdagangan ketika Ukraina hendak menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa (bbc.com, 2014). Dengan adanya kepentingan yang signifikan untuk mengendalikan reformasi politik demokratis yang dapat meningkatkan hubungan Ukraina dengan Eropa dan mengurangi hubungan Ukraina dengan Rusia, Rusia kemudian mengirimkan pasukan ke perbatasan Ukraina-Rusia

(bbc.com, 2014). Rusia berdalih bahwa pasukan yang dikirim bukan merupakan pasukan militer melainkan kelompok pertahanan diri untuk melindungi etnis Rusia yang berada di daerah tersebut.

Menyusul kerusuhan pasca aksi protes yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 121 orang pada bulan November 2013 hingga Februari 2014, pelanggaran terhadap HAM dalam Konflik Ukraina semakin meningkat. Pada akhir Februari konflik memang sempat mereda yang diikuti dengan meredanya pelanggaran terhadap HAM. Namun pelanggaran terhadap HAM kembali terjadi ketika pemerintahan yang baru tidak mewakili kepentingan dari penduduk dengan etnis Rusia yang berada di daerah timur Ukraina (OHCHR, 2014).

Untuk mengurangi dampak kemanusiaan, Rusia mengambil bagian dalam kebijakan bantuan kemanusiaan ke Ukraina yang terdiri dari 277 truk pada 22 Agustus 2014. Bantuan ini dikirim ke wilayah timur Ukraina, yaitu wilayah Donbas – yang meliputi daerah Donetsk dan Luhansk. Daerah Donetsk dan Luhansk merupakan daerah yang menjadi basis pertempuran antara tentara Ukraina dan kelompok separatis. Sejak Agustus 2014 hingga akhir 2015, Rusia telah mengirimkan lebih dari 54.500 ton bantuan kemanusiaan dan terus mengirimkan bantuan kemanusiaan hingga saat ini (sputniknews.com, 2015).

Misi kemanusiaan internasional yang diberikan oleh Rusia menimbulkan kecurigaan bagi Ukraina. Ukraina tidak percaya pada ketulusan Rusia dalam memberikan misi kemanusiaan. Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, menganggap Rusia melanggar hukum internasional dengan membawa masuk bantuan kemanusiaan ke daerah Ukraina tanpa izin dan tanpa pengawalan dari Komite Palang Merah Internasional atau ICRC (bbc.com, 2014). Namun, Rusia tetap mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah timur Ukraina meskipun tidak mendapat persetujuan Ukraina.

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul pertanyaan yaitu mengapa Rusia memberikan bantuan kemanusiaan dalam konflik Ukraina. Penelitian ini menggunakan teori realisme neoklasik untuk menganalisis permasalahan tersebut.

Teori realisme neoklasik muncul pasca Perang Dingin pada awal 1990-an. Realisme neoklasik merupakan suatu pendekatan yang mengkombinasikan elemen sistem, struktur dan politik domestik, serta faktor material dan ideasional untuk menganalisa hubungan internasional dari perspektif yang plural (Kitchen, 2010: 119). Penganut realisme neoklasik berpandangan bahwa ruang lingkup dan ambisi kebijakan luar negeri suatu negara didorong oleh posisi negara tersebut dalam sistem internasional dan secara khusus ditentukan berdasarkan kapabilitas kekuatan material relatif. Realisme neoklasik mengintegrasikan tingkat analisa unit (realisme klasik) dan tingkat analisa struktur (neorealisme) sehingga memadai untuk memahami perilaku negara di arena internasional (Rosyidin, 2010: 155). Realisme neoklasik sebagai multi-level analisis yang menggabungkan faktor internasional dan domestik dapat menghubungkan pengaruh dari faktor sistemik terhadap pertimbangan domestik untuk menjelaskan pembuatan kebijakan luar negeri (Ford, 2009: 9).

Realisme neoklasik khususnya berkaitan dengan sumber dan penggunaan kekuatan nasional dalam politik internasional dan permasalahan yang dihadapi oleh pemimpin dalam membuat kebijakan luar negeri (Lobell, Ripsman, & Taliaferro; 2009: 16). Pengaruh sistem internasional kepada perilaku negara harus menjadi pertanyaan pertama apabila menganalisa kebijakan luar negeri, sehingga faktor ini disebut sebagai variabel independen. Tekanan sistemik harus diterjemahkan melalui unit-level atau faktor internal negara (Rose, 1998: 146). Oleh karena itu faktor internal merupakan variabel intervening dalam menganalisa kebijakan luar negeri. Variabel intervening sering diidentifikasi sebagai faktor domestik tertentu yang mengubah pandangan negara dalam melihat lingkungan eksternal (Rathbun, 2008: 312), seperti persepsi pemimpin akan ancaman,

kemampuan untuk memobilisasi sumber daya domestik, struktur domestik negara, dan lain sebagainya. Realisme neoklasik mengidentifikasi perhitungan dan persepsi elit dalam kekuatan relatif dan kendala domestik sebagai variabel intervening di antara tekanan internasional dan kebijakan luar negeri negara (Lobell, Ripsman, & Taliaferro; 2009: 28).

PEMBAHASAN

Pada 2014, Ukraina mendapat perhatian dunia internasional dikarenakan krisis yang terjadi di negara tersebut. Begitu banyaknya dampak kemanusiaan yang ditimbulkan oleh Krisis Ukraina menyebabkan perlunya pemberian bantuan kemanusiaan dengan segera. Bantuan kemanusiaan yang diberikan Rusia kepada Donbas merupakan strategi untuk mempertahankan pengaruh Rusia di Ukraina demi mempertahankan posisi Rusia dalam sistem internasional.

Dampak Kemanusiaan Akibat Krisis Ukraina

Krisis Ukraina yang telah dimulai sejak akhir 2013 telah menimbulkan begitu banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang bahkan termasuk dalam kategori kejahatan perang. Menurut Statuta Roma dalam Pasal 8, kejahatan perang merupakan tindakan-tindakan dalam peperangan yang melanggar Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 serta hukum atau kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional. Berdasarkan Statuta Roma tersebut, beberapa kejahatan perang yang terjadi dalam krisis Ukraina diantaranya adalah pembunuhan secara sengaja; penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi; secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau kesehatan; melancarkan serangan terhadap penduduk sipil dan objek-objek sipil serta sarana lainnya yang bukan objek militer; melakukan perkosaan; dan masih banyak lagi.

Dengan situasi yang semakin memburuk, dampak sosial-ekonomi pun semakin bermunculan. Konflik menyebabkan kemampuan dan akses ke makanan menjadi berkurang dengan terbatasnya pemasukan para pengungsi, bertambahnya jumlah pengangguran, dan sistem transportasi di daerah konflik yang terganggu (ACAPS, 2014: 2). Konflik yang terjadi selama berbulan-bulan tersebut juga mempengaruhi perekonomian di Ukraina. Selain itu, anggaran kesehatan di Ukraina termasuk rendah dan tidak adanya tambahan dana yang dapat dialokasikan untuk pengungsi. Dengan adanya konflik, akses ke layanan kesehatan menjadi semakin terbatas, terutama dengan rusaknya fasilitas kesehatan, terbatasnya persediaan kebutuhan dan personil medis. Selain itu, infrastruktur dan fasilitas publik juga mengalami kerusakan.

Konflik menyebabkan berbagai kesulitan tersendiri bagi anak-anak. Sebagian besar anak-anak tinggal di lembaga anak-anak yang dijalankan pemerintah seperti panti asuhan, asrama, dan penampungan. Sedangkan sebagian anak lainnya tidak mempunyai tempat tinggal dan hidup di jalanan (UNICEF dalam ACAPS, 2014: 7). Perdagangan dan prostitusi anak dalam skala besar, baik lintas batas negara maupun secara internal, merupakan masalah serius lainnya, bahkan sebelum muncul konflik. Dengan meningkatnya jumlah pengungsi, kasus perdagangan manusia tersebut semakin meningkat pula (COE dalam ACAPS, 2014: 8). Terdapat pula beberapa bukti yang menunjukkan perekrutan anak-anak dalam pertempuran di kedua belah pihak (BBC dalam ACAPS, 2014: 8).

Konflik di dalam dan di sekitar Ukraina memaksa ribuan orang meninggalkan rumah mereka dan mencari tempat perlindungan dimana-mana. Terdapat dua penyebab utama yang meningkatkan jumlah pengungsi di dalam dan juga di luar Ukraina. Pertama, adanya aneksasi Krimea yang memicu para penduduk termasuk suku Tatar Krimea untuk meninggalkan semenanjung Krimea; dan kedua, 'proklamasi kemerdekaan' oleh 'Republik Rakyat Donetsk' dan 'Republik Rakyat Luhansk', dan juga semakin intensifnya pertempuran di Ukraina timur pada pertengahan 2014, menyebabkan peningkatan jumlah pengungsi secara drastis (OSCE, 2016). Selain mengungsi ke daerah-daerah lain di

Ukraina, atau seringkali disebut sebagai pengungsi internal (*internally displaced persons*), sebagian besar warga sipil lainnya memilih untuk mengungsi ke negara-negara tetangga, yang disebut sebagai pengungsi eksternal.

Struktur Internasional: Dinamika Keseimbangan Kekuasaa Abad 21

Dalam politik internasional, dunia adalah sebuah sistem, di mana interaksi yang terjadi di dalam sistem ditandai dengan politik kekuatan antar negara (Hough, 2004: 3). Oleh karena itu, sistem internasional dapat diartikan sebagai hubungan internasional antar negara yang memunculkan pola interaksi tertentu, baik antar negara dengan kekuatan besar dan lemah. Merupakan hukum alam dalam politik internasional bahwa ketika suatu negara menjadi terlalu kuat, negara-negara lain akan melakukan *balance of power*. Beberapa negara (dan gabungan negara) dengan kekuatan besar yang menjadi aktor utama dalam struktur internasional saat ini diantaranya yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan BRICS.

Dunia internasional sepakat bahwa Amerika Serikat merupakan negara dengan kekuatan yang penting pada awal abad ke-21. Kekuatan ekonomi, militer, hingga *soft power* Amerika Serikat yang begitu besar tidak diragukan lagi telah menjadikan Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Amerika Serikat tetap akan mempertahankan posisinya sebagai negara adidaya. Akan tetapi, dengan bangkitnya kekuatan komprehensif negara-negara lain, posisi relatif Amerika Serikat akan menurun (Xintian, 2008: 137). Perkembangan Tiongkok saat ini telah membuatnya menjadi negara dengan kekuatan besar selain Amerika Serikat. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, negara yang memiliki senjata nuklir, anggota permanen Dewan Keamanan PBB, pemegang cadangan devisa terbesar, dan semakin meningkatnya pengaruh Tiongkok yang tersebar di seluruh dunia, dunia internasional telah mengakui status Tiongkok sebagai salah satu negara penting di dunia (Glosny, 2010: 109).

Selain Amerika Serikat dan Tiongkok, terdapat pula gabungan negara yang memainkan peranan penting dalam sistem internasional saat ini. Uni Eropa merupakan organisasi supranasional yang menjadi aktor penting dalam sistem internasional dengan kekuatan yang tidak dapat diremehkan. Dengan adanya kebijakan luar negeri dan keamanan bersama (*common foreign and security policy*) dan kebijakan pertahanan dan keamanan Eropa (*European security and defence policy*), dunia internasional dapat melihat Uni Eropa sebagai suatu kesatuan yang mempunyai potensi bertindak dalam lingkup global (Landaburu, 2014: 3). Selain Uni Eropa, BRICS telah menjadi salah satu aktor yang mempunyai pengaruh politik dalam sistem internasional. BRICS telah bertransformasi dari gagasan abstrak menjadi kelompok politik yang lebih formal, dengan adanya pertemuan BRICS resmi dan komunike bersama (Glosny, 2010: 102).

Interaksi antara kekuatan-kekuatan besar dalam sistem internasional selalu mengalami dinamika dan perubahan. Dalam sistem internasional saat ini, Uni Eropa dan Amerika Serikat merupakan mitra paling strategis. Hubungan antara kedua kekuatan besar ini sangat penting dalam sistem internasional dan hubungan ini didasarkan pada kepentingan yang sama (Pollack dalam Laura, 2014: 276).

Kawasan Eropa Timur sedang mengalami perubahan yang cukup signifikan selama beberapa waktu terakhir. Secara umum, dekade terakhir merupakan periode berkembang dan meningkatnya ekonomi dan kesejahteraan di Eropa Timur (Larrabee, 2006: 118). Pada saat yang bersamaan, dinamika politik yang terjadi di kawasan Eropa Timur mempengaruhi pola interaksi di dalam kawasan. Bergabungnya beberapa negara kawasan dalam NATO dan Uni Eropa memberikan perubahan kerja sama regional dan menyebabkan keberpihakan yang baru. Dalam kawasan Eropa Timur, kepentingan Amerika Serikat adalah untuk membangun Eropa yang lebih kuat dan kohesif (Larrabee,

2006: 130-131). Perubahan di kawasan diperkuat dengan munculnya kembali Rusia sebagai aktor regional dan internasional yang penting.

Runtuhnya Uni Soviet dan jatuhnya sistem ekonomi membuat Rusia sempat kehilangan statusnya sebagai negara adidaya. Oleh karena itu Rusia berusaha memperoleh kembali apa yang telah hilang. Menurut pandangan Rusia, dunia internasional didominasi oleh beberapa negara besar yang saling mengimbangi kekuatan satu sama lain (Carlsson, Oxenstierna, dan Weissmann; 2015: 19). Menurut Konsep Kebijakan Luar Negeri 2013, Rusia menganggap dirinya sebagai negara dengan kekuatan besar dalam dunia internasional yang berupaya menjalin hubungan yang kuat dan saling menguntungkan melalui kerja sama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain, asosiasi antarnegara, organisasi internasional, maupun forum internasional lainnya dengan pendekatan multi-vektor.

Rusia melihat bahwa pengaruh Barat dapat mengurangi ruang lingkup pengaruhnya dalam dunia internasional. Posisi Rusia sebagai salah satu pemegang hak veto dalam Dewan Keamanan PBB membuatnya seimbang dengan Amerika Serikat dan dapat menghentikan inisiatif negara tersebut untuk meningkatkan dominasi sekaligus mengurangi pengaruhnya dalam dunia internasional serta menetapkan posisi sebagai kekuatan besar dan mitra yang relevan dalam dunia internasional (Lo dalam Carlsson, Oxenstierna, dan Weissmann; 2015: 20). Meskipun begitu, Rusia akan tetap menjaga relasinya dengan Amerika Serikat dengan kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang perdagangan, investasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dll sebagai tanggung jawab kedua negara untuk menjaga stabilitas strategis dan keamanan internasional. Sama seperti hubungannya dengan Amerika Serikat, Rusia tetap berusaha menjaga hubungannya dengan Uni Eropa melalui peningkatan kerja sama terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan sebagai mitra kebijakan luar negeri yang penting, memperkuat hubungan timbal balik, dll – meskipun kedua pihak sering mengalami ketegangan karena kepentingan geopolitik dan geostrategi yang saling bergesekan.

Tiongkok dan Rusia merupakan dua negara yang berusaha memperoleh kembali posisi mereka dalam dunia internasional. Kedua negara tersebut telah kehilangan status negara dengan kekuatan besar pada masa lampau: Tiongkok kehilangan status negara besar akibat imperialisme Barat dan intervensi Jepang sedangkan Rusia disebabkan runtuhnya Uni Soviet (Carlsson, Oxenstierna, dan Weissmann, 2015: 11). Hubungan kedua negara tersebut terus mengalami perubahan. Meskipun saling bekerja sama, Rusia dan Tiongkok juga saling berkompetisi (Carlsson, Oxenstierna, dan Weissmann, 2015: 11).

Selain hubungan bilateral, Rusia menekankan pentingnya organisasi multilateral dan mekanisme kerja sama seperti G8, G20, BRICS, dan RIC (Rusia, India, Tiongkok) – dimana posisi tiap anggota dianggap sama (Kaczmarek dalam Carlsson, Oxenstierna, dan Weissmann; 2015: 20; Konsep Kebijakan Luar Negeri Federasi Rusia, 2013). Rusia juga memberikan perhatian khusus kepada kawasan Eropa Timur. Geopolitik dan geostrategi Eropa Timur yang potensial menyebabkan kawasan diperebutkan oleh Barat dan Rusia. Rusia telah melakukan beberapa upaya di kawasan dengan tujuan untuk mempertahankan dan mengembalikan kekuatan serta pengaruh Rusia, meski sebagian kebijakannya mendapat kecaman dari dunia internasional.

Upaya Rusia untuk mempertahankan kekuasaan semakin terganggu ketika Ukraina hendak mempererat hubungannya dengan Uni Eropa. Integrasi Ukraina kedalam tatanan Barat dapat mengubah *balance of power* di Eropa dan mencegah pemulihan hegemoni Rusia pasca runtuhnya Soviet (Larrabee, 2010). Rusia takut dengan keberadaan Uni Eropa karena kedekatan organisasi tersebut dengan negara mantan Soviet dan karena prinsip serta norma ekonomi yang bertentangan dengan sistem Rusia (Giles, dkk; 2015: 36). Selain itu,

bagi Rusia, integrasi beberapa negara Eropa Timur dalam NATO dan Uni Eropa menyebabkan berkurangnya pengaruh Rusia di Eropa Timur.

Gagasan Putin tentang Rusia dan Implikasinya terhadap Kebijakan Bantuan Kemanusiaan di Donbas

Gagasan Putin mengenai Rusia tidak terlepas dari kejayaan pada masa Uni Soviet. Uni Soviet mencapai masa puncaknya dengan mendominasi negara-negara bekas Rusia yang telah memperoleh kemerdekaannya pada 1920an, sebagian Jerman dan Polandia, serta membentuk negara-negara satelit di Eropa Timur. (McNabb, 2016: 19). Kejayaan Uni Soviet tidak terlepas dari para pemimpin yang berhasil melakukan propaganda sepanjang masa Perang Dingin yaitu Vladimir Lenin dan Joseph Stalin. Di bawah rezim komunis, Uni Soviet bertransformasi menjadi negara industri modern. Propaganda Soviet pada masa itu pun berfokus pada pengembangan industri. Setelah 1945, kebijakan luar negeri Uni Soviet berfokus pada menahan invasi Barat melalui dominasi politik dan militer. Kemunculan Perang Dingin antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat melawan blok timur yang terdiri dari Uni Soviet dan sekutunya pada dasarnya merupakan kompetisi dalam hal kekuatan, pengaruh, dan teknologi diantara kedua blok.

Pada era sekarang, sejarah berperan penting dalam politik luar negeri Rusia. Politik luar negeri Rusia mencerminkan keinginan pemimpin Rusia untuk memperoleh kembali posisi yang telah dimiliki pada masa Uni Soviet, yaitu posisi sebagai negara adidaya global (Hanson, 2016: 13). Putin sebagai pemimpin Rusia saat ini pun telah bertekad untuk mengembalikan status Rusia sebagai kekuatan besar. Menurut Nygren (2008: 230), tujuan Putin saat ini adalah untuk meningkatkan pengaruh kebijakan luar negeri Rusia, mempromosikan monopoli ekonomi, mengkonsolidasikan ketergantungan politik, dan membatasi pengaruh Barat sambil membangun kembali pengaruh global dengan menghapuskan uni-polaritas Amerika Serikat.

Rusia dan Barat saling berebut pengaruh di Eropa Timur untuk mengurangi dominasi masing-masing. Putin beranggapan bahwa Barat berupaya mengurangi dominasi Rusia di kawasan regional melalui kebijakan-kebijakannya. Oleh karena itu, Rusia telah melakukan aksi untuk mengacaukan kebijakan Barat dalam beberapa tahun terakhir (Mead, 2016: 37). Salah satu aksi Rusia dalam lingkup regional yang paling memprovokasi Barat adalah keputusan untuk menganeksasi Krimea (Bayer, 2016). Ambisi politik Putin membuat Rusia kembali dinilai sebagai ancaman bagi Eropa, dan Barat, serta sebagai kekuatan yang diperhitungkan, terutama di Timur Tengah (Hanson, 2016: 13). Dalam Krisis Ukraina, Amerika Serikat melihat Rusia sebagai musuh dan agresor. Namun, Rusia memilih untuk secara konsisten mempertahankan kepentingan nasional negara meskipun diancam dengan berbagai sanksi dan kemungkinan meningkatnya masalah-masalah di dalam negeri.

Sejak awal periode kepresidenan, Putin telah menganggap penting Ukraina. Pertama, Ukraina merupakan kekuatan penting bagi Rusia selama masa Uni Soviet, meski tetap diliputi beberapa konflik terbuka. Kedua, Ukraina merupakan bagian dari Rusia secara sejarah, budaya, sosial, ekonomi, militer dan politik. Ketiga, Ukraina memiliki potensi politik dan ekonomi yang begitu besar baik bagi Eropa maupun Rusia (Nygren, 2008: 226). Tujuan Rusia adalah untuk mendapatkan pengaruh permanen dalam kebijakan politik dan ekonomi di Ukraina. Oleh karena itu, Moskow melihat bahwa kedekatan hubungan Ukraina dengan Uni Eropa dan NATO akan menjadi ancaman bagi kepentingan keamanan Rusia (Rodkiewicz, Rogoza, dan Miazga; 2014). Transformasi Ukraina dan integrasinya dengan Barat akan menyebabkan Rusia kehilangan perannya sebagai kekuatan regional.

Putin telah mengeluarkan kebijakan bantuan kemanusiaan dalam Krisis Ukraina sejak Agustus 2014 yang secara spesifik diberikan di daerah-daerah timur Ukraina sebagai lokasi konflik melawan pemerintahan Kiev. Wilayah Donbas, terutama Donetsk dan Luhansk, yang menjadi pusat pemberian bantuan kemanusiaan memiliki arti penting bagi Rusia dalam upayanya memperoleh pengaruh di Ukraina. Pertama, Donbas merupakan daerah yang strategis dan telah menjadi daerah pusat industri sejak masa Kekaisaran Rusia maupun Uni Soviet. Kedua, berdasarkan letak geografis, Donbas menghubungkan wilayah Ukraina dari Kharkiv menuju Odesa (daerah timur laut menuju baratdaya) yang secara langsung berbatasan dengan wilayah Rusia. Ketiga, perselisihan historis antara Rusia dan Ukraina pada dasarnya berpusat di daerah Donbas (Wilson, 1995:267). Wilayah Donbas akan menjadi 'batu loncatan' bagi Rusia untuk menyebarkan pengaruhnya di seluruh Ukraina (Robinson, 2016: 2).

Keputusan Putin untuk mengeluarkan bantuan kemanusiaan dalam Krisis Ukraina didasarkan pada keinginan Putin untuk memberikan bantuan dan dukungan kepada para separatis yang berada di daerah timur Ukraina. Selain itu, bantuan kemanusiaan diberikan untuk menanggulangi kemungkinan kemenangan tentara Ukraina melawan separatis di wilayah timur Ukraina pada saat itu. Putin yang khawatir bahwa pengaruhnya akan hancur, mengeluarkan kebijakan bantuan kemanusiaan (washingtonpost.com, 2014). Rusia ingin memastikan otonomi di Donbas yang merupakan daerah pro-Rusia dapat digunakan oleh Rusia sebagai instrumen untuk mempengaruhi Kiev. Intervensi militer secara besar-besaran di Ukraina dapat menjadi serangan balik bagi Rusia: memperkuat keinginan Kiev untuk bergabung dengan Barat dan meningkatkan kemungkinan terlibatnya Barat secara langsung untuk mendukung Ukraina serta menambah sanksi dan ketidaksukaan dunia internasional akan Rusia.

PENUTUP

Berdasarkan analisis menggunakan teori realisme neoklasik, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian bantuan kemanusiaan oleh Rusia di Donbas dalam konflik Ukraina merupakan strategi untuk mempertahankan pengaruh Rusia di Ukraina. Strategi Rusia tersebut juga akan memberikan dampak bagi meningkatnya pengaruh Rusia dan mengurangi pengaruh Barat di negara-negara kawasan. Dengan demikian, Rusia dapat mempertahankan statusnya sebagai pemain global dan meningkatkan posisinya dalam dunia internasional.

Kebijakan bantuan kemanusiaan Rusia dipengaruhi struktur internasional yang anarki dimana negara-negara saling berebut pengaruh dan kekuasaan. Rusia berupaya menjadi kekuatan hegemonik dan mengimbangi negara-negara besar terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pola interaksi dan perebutan pengaruh negara-negara tersebut di kawasan Eropa Timur juga berperan penting. Dalam konteks penelitian ini, situasi tersebut merupakan variabel independen di balik kebijakan bantuan kemanusiaan Rusia. Pandangan Putin dalam melihat Rusia sebagai negara besar menjadi faktor internal yang berperan sebagai variabel intervening untuk menerjemahkan dan merespon lingkungan eksternal tersebut. Putin berupaya meningkatkan pengaruh Rusia sekaligus mengurangi dominasi Barat untuk mengembalikan status Rusia sebagai negara besar.

Krisis Ukraina merupakan bukti perebutan pengaruh antara Rusia dan Barat. Rusia menganggap Ukraina sebagai negara yang strategis dan tidak ingin bergeser secara geopolitik ke Uni Eropa – yang juga meningkatkan kemungkinan bergesernya arah geopolitik di kawasan Eropa Timur menuju Barat. Putin melihat bahwa Barat berupaya mengurangi pengaruh Rusia di Ukraina dan Eropa Timur. Oleh karena itu, Putin perlu membuat strategi untuk mempertahankan pengaruh Rusia di Ukraina, yaitu kebijakan pemberian bantuan kemanusiaan kepada Donbas dalam konflik Ukraina.

Referensi

- ACAPS. 2014. *Eastern Ukraine: Humanitarian Impact of the Conflict* <http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/e-ukraine-sdr.pdf> (diakses pada 10 Januari 2017).
- Bayer, Lili. 2016. *The US and Russia Bargain over Eastern Europe* <https://geopoliticalfutures.com/the-us-and-russia-bargain-over-eastern-europe/> (diakses pada 20 September 2017).
- BBC. 2014. *Ukraine Crisis: Timeline* <http://www.bbc.com/news/world-europe-25182823> (diakses pada 6 Oktober 2015).
- BBC. 2014. *Why is Ukraine in Turmoil?* <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275> (diakses pada 6 Oktober 2015).
- Carlsson, Märta, Susanne Oxenstierna dan Mikael Weissmann. 2015. *China and Russia – A Study on Cooperation, Competition and Distrust*. Stockholm: Swedish Defence Research Agency.
- Ford, Arthur P. 2009. *Denting the Hub, or Strengthening the Spokes? A Neoclassical Realism Analysis of New Security Trends in the Pacific*. Alabama: School of Advanced Air and Space Studies Air University Maxwell Air Force Base.
- Giles, Keir dkk. 2015. *The Russian Challenge*. London: Latimer Trend.
- Glosny, Michael A. 2010. 'China and the BRICs: A Real (but Limited) Partnership in a Unipolar World', *Polity*, Vol. 42, No. 1, pp 100-129.
- Hanson, Philip dalam Ferrari, Aldo (Editor). 2016. *Putin's Russia: Really Back?*. Milano: The Italian Institute for International Political Studies (ISPI).
- Hough, Peter. 2004. *Understanding Global Security*. London: Routledge
- International Criminal Court. 2011. *Rome Statute of the International Criminal Court*. The Hague: International Criminal Court.
- Kitchen, Nicholas. 2010. 'Systemic Pressures and Domestic Ideas: A Neoclassical Realist Model of Grand Strategy Formation', *Review of International Studies*, Vol. 36, No. 1, pp. 117-143.
- Landaburu, Eneko. 2014. 'The Role of the European Union in the World', *European Policy Brief*, No. 22, Egmont Institute.
- Larrabee, F. Stephen. 2006. 'Danger and Opportunity in Eastern Europe', *Foreign Affairs*, Vol. 85, No. 6, pp 117-131.
- Laura, Mădălina. 2014. 'The US-EU Relation: Competition or Cooperation', *SEA – Practical Application of Science*, Vol. 2, No. 3 (5), pp 275-280.
- Lobell, Steven E., Norrin M. Ripsman, dan Jeffrey W. Taliaferro. 2009. *Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy*. New York: Cambridge University Press.
- McNabb, David E. 2016. *Vladimir Putin and Russia's Imperial Revival*. Boca Raton: Taylor & Francis Group.
- Mead, Walter Russell dalam Ferrari, Aldo (Editor). 2016. *Putin's Russia: Really Back?*. Milano: The Italian Institute for International Political Studies (ISPI).
- Nygren, Bertil. 2008. *The Rebuilding of Greater Russia: Putin's Foreign Policy towards the CIS Countries*. New York: Routledge.

- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2014. *Report on the human rights situation in Ukraine: 15 December 2014* http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/OHCHR_eighth_report_on_Ukraine.pdf (diakses pada 11 Oktober 2015).
- Organization for Security and Co-operation in Europe. 2016. *Thematic Report: Conflict-related Displacement in Ukraine: Increased Vulnerabilities of Affected Populations and Triggers of Tension within Communities* <http://www.osce.org/ukraine-smm/261176?download=true> (diakses pada 20 Januari 2017).
- Rathbun, Brian. 2008. 'A Rose by Any Other Name: Neoclassical Realism as the Logical and Necessary Extension of Structural Realism', *Security Studies*, Vol. 17, No. 2, pp 294-321.
- Robinson, Paul. 2016. 'Russia's Role in the War in Donbas, and the Threat to European Security', *European Politics and Security*, Vol. 17, No. 4, pp. 506-521.
- Rodkiewicz, Witold, Jadwiga Rogoża, dan Agata Wierzbowska-Miazga. 2014. *Russian Policy towards Ukraine: Local Actions, Global Goals* <https://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2014-08-20/russian-policy-towards-ukraine-local-actions-global-goals> (diakses pada 20 September 2017).
- Rose, Gideon. 1998. 'Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy', *World Politics*, Vol. 51, No.1, pp. 144-172.
- Rosyidin, Mohamad. 2010. 'Integrasi Struktur dan Unit: Teori Politik Luar Negeri dalam Perspektif Realisme Neoklasik', *Global*, Vol.10, No.2, pp. 150-163
- Sputnik. 2015. *The 46th Humanitarian Aid Convoy that the Russian Emergencies Ministry Has Prepared for Residents of Ukraine's Crisis-Hit Southeastern Region (Donbas) Has Departed for Donetsk and Lugansk, a Ministry Representative Told Journalists* <https://sputniknews.com/russia/201511261030770730-donbas-humanitarian-convoy/> (diakses pada 30 November 2015).
- Washington Post. 2014. *The West must Oppose Russia's 'Humanitarian' Invasion of Ukraine* https://www.washingtonpost.com/opinions/the-west-must-oppose-russias-humanitarian-invasion-of-ukraine/2014/08/11/ade3c982-217a-11e4-8593-da634b334390_story.html?utm_term=.1d1faea691a2 (diakses pada 20 September 2017).
- Wilson, Andrew. 1995. 'The Donbas between Ukraine and Russia: The Use of History in Political Disputes', *Journal of Contemporary History*, Vol. 30, No. 2 (April), pp. 265-289.
- Xintian, Yu dalam Chari, Chandra (Editor). 2008. *War, Peace and Hegemony in a Globalized World: The Changing Balance of Power in the Twenty-First Century*. New York: Routledge.